

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

# TGUPP Jangan Ganggu Kerja Anies

**JAKARTA** - Belakangan ini muncul desakan dari Boy Bernadi Sadikin, mantan Ketua Relawan Pemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017, agar Gubernur Anies Baswedan membubarkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Alasannya, dalam kondisi pandemi COVID-19, perlu efisiensi dan efektivitas lembaga di lingkungan Pemprov DKI.

Terlebih belum lama ini, langkah efisiensi dan efektivitas lembaga juga dilakukan pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membubarkan belasan lembaga yang dianggap tidak produktif. Tentunya, hal ini juga menjadi langkah dalam efisiensi anggaran.

Karena itu, desakan untuk membubarkan TGUPP di lingkungan Pemprov DKI juga sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Berbagai kalangan pun menanggapi desakan dan kritik Boy Sadikin kepada Anies dengan persepsi yang berbeda-beda ■

## ■ Sambungan dari halaman 9

Sebagian beranggapan bahwa desakan tersebut cukup realistis, menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang membutuhkan anggaran besar.

Sehingga, anggaran untuk membayar honor TGUPP bisa dialihkan untuk menambah anggaran penanganan COVID-19 di ibu kota.

Terdapat juga anggapan bahwa TGUPP yang dibentuk untuk membantu kelancaran tugas Gubernur Anies, justru menjadi penghambat.

Banyak program kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya lantaran masukan-masukan dari TGUPP. Ada juga yang berpendapat bahwa desakan pembubaran TGUPP lantaran adanya pihak memberikan masukan atau bisikan 'kompas' kepada Boy Sadikin dengan tujuan merenggangkan hubungannya dengan Gubernur Anies Baswedan.

Menanggapi persoalan itu, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan, kritik yang terlontar dari Boy Sadikin memiliki dasar yang kuat. "Dikira ada 'kompas', tidak benar. Pak Boy adalah orang yang

sangat paham tentang Jakarta, birokrasi dan perpolitikan. Beliau (Boy) juga mantan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dan anak dari mantan Gubernur Ali Sadikin. Bahkan, pernah menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi, Pak Boy tidak miskin informasi dan perkembangan soal Jakarta," beber dia.

Menurut Amir, kritik Boy Sadikin tersebut bertujuan membantu Gubernur Anies agar tidak 'digerecoki' oleh orang-orang di sekitarnya. Terutama yang duduk di TGUPP. "Selanjutnya tergantung bagaimana gubernur menyikapinya. Gubernur Anies makin mendekati masa akhir jabatannya. Oktober 2020 adalah tahun ketiga menjabat. Akan ada tantangan dan peluang baru yang tak bisa diselesaikan oleh Anies sendiri," tandas Amir.

Amir menegaskan, Gubernur Anies harus menyadari bahwa dirinya memiliki banyak dukungan. Yakni secara formal, hubungan antara gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Maupun non-formal, yakni hubungan antara gubernur dengan para relawan pendukungnya di Pilgub 2017. "Semua pendukung pastinya berharap Gubernur



**Oktober 2020** adalah tahun ketiga menjabat. Akan ada tantangan dan peluang baru yang tak bisa diselesaikan oleh Anies sendiri".

**Amir Hamzah**  
Pengamat Kebijakan Publik

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

# TGUPP Jangan Ganggu Kerja Anies

Anies bisa menyelesaikan tugas dengan baik," tutur dia.

Ia juga mengaku sempat berbincang-bincang Boy Sadikin terkait persoalan itu. Terungkap, pasca desakan pembubaran TGUPP, Boy banyak menerima berbagai komentar melalui WhatsApp-nya. Semuanya bernada menyudutkan. Di antara komentar tersebut ada yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan Boy merupakan hasil bisikan orang lain. "Boy marah dan tersinggung, serta merasa tak nyaman karena merasa direndahkan dan disepelekan. Sebab, apa yang disampaikannya itu berdasarkan pengamatan dan analisisnya selama ini, bukan dari (bisikan-red) orang lain," ungkap Amir.

Pada Minggu (9/8/2020), Boy mengatakan bahwa terlalu banyak bidang di TGUPP. Sehingga mesin birokrasi tidak berjalan maksimal dalam melayani masyarakat Jakarta. Ia menyarankan agar bidang-bidang itu dipangkas. Begitu pula dengan jumlah personelnya, sehingga personel TGUPP yang berjumlah 67 orang, cukup menjadi 20 orang saja. "Di TGUPP banyak bidang, seperti Bidang Hukum dan Reklamasi Pantura. Yang lain

bubarkan aja. Cukup 20 orang aja untuk membantu gubernur. Terlalu banyak orang jadi pemborosan anggaran. Birokrasi malah jadi nggak kerja maksimal," kata Boy.

Menurut Boy, seharusnya TGUPP dapat membantu kelancaran tugas gubernur. Kenyataannya justru berbalik, kinerja TGUPP tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pergub No. 16/2019. Indikasi keberadaan TGUPP menghambat pelayanan kepada masyarakat adalah adanya kasus sengketa penyewaan gedung di Jalan Pintu Besar Selatan, Jakarta Barat, antara Bank DKI dan Gubernur DKI Jakarta sebagai tergugat I dan II, dengan ahli waris The Tjin Kok yang tak kunjung tuntas, meski keputusan pengadilan untuk sengketa itu telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Contoh lain, sengketa lahan seluas 6.393 m2 di Jalan Danau Tondano, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, antara Pemprov DKI dengan ahli waris Aria Jipang. Meski putusan Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan ahli waris, kasus ini juga belum selesai.

Bahkan lahan sengketa itu

saat ini dimanfaatkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta sebagai lapangan sepak bola. "Ini namanya menzalimi rakyat. Terindikasi adanya permainan di TGUPP, sehingga gubernur mendapatkan masukan yang tidak sehat," pungkas Boy.

## Bentuk Keprihatinan

Sementara itu, Aji Rimbawan dari Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ) menuturkan, kritik yang dilontarkan Boy Sadikin merupakan masukan yang sangat berarti bagi Gubernur Anies Baswedan. "Jangan dinilai sebagai bentuk kontroversi. Ini murni kritik membangun yang tujuannya membantu kelancaran tugas gubernur hingga akhir jabatannya," tutur dia.

Aji juga meyakini bahwa kritik tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi dan kondisi saat ini di ibu kota. "Menurut saya, apa yang disampaikan Boy Sadikin, merupakan keprihatinan terhadap permasalahan di DKI Jakarta. Mulai dari PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru), masalah kesehatan (pandemi COVID-19) hingga persoalan reklamasi (rul/ibl)